



## PELAPORAN KEBERLANJUTAN PERIODE 2014-2018: APAKAH KARAKTERISTIK DEWAN DAN USIA PERUSAHAAN MEMILIKI PERAN?

Aulia Irfan Mufti<sup>1</sup>, Puji Wibowo<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> [auliairfanmufti@gmail.com](mailto:auliairfanmufti@gmail.com), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2</sup> [puji.wibowo@pknstan.ac.id](mailto:puji.wibowo@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

\*penulis korespondensi

### Abstract

*This study aims to determine the effect of board characteristics and company age on the quality of sustainability reporting on Indonesian companies in 2014-2018. The characteristics of the board are represented by 9 (nine) variables, namely the presence of board members aged 60 years or more, the number of board meetings, the number of directors' meetings, the proportion of independent commissioners, the proportion of former government officials on the board of commissioners, the proportion of government officials on the board of commissioners, board size, the presence of women on the council, and the ethnic diversity of the council. Meanwhile, the company's age variable is measured using the natural logarithm of the age of the company from established until the reporting year. The quality of sustainability reporting is measured using a scale developed by Aداui (2020). The population of this study is companies listed on the Indonesia Stock Exchange that submit sustainability reports for the 2014-2018 period. The test got 185 observations, that is, 37 companies a year were obtained from purposive sampling. The Fixed Effect Model is used as a panel data estimation model. The results showed that the number of board of directors meetings, board size, and age of the company had a significant positive effect on the quality of corporate sustainability reporting in Indonesia. Meanwhile, other variables certainly do not have a significant effect on the quality of Indonesian company sustainability reporting.*

**Keywords:** Board characteristics, Company age, Quality of sustainability reporting

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan direksi dan usia perusahaan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan Indonesia tahun 2014-2018. Karakteristik dewan diwakili oleh 9 (sembilan) variabel yaitu keberadaan anggota dewan yang berusia 60 tahun atau lebih, jumlah rapat dewan, jumlah rapat direksi, proporsi komisaris independen, proporsi mantan pejabat pemerintah, pejabat di dewan komisaris, proporsi pejabat pemerintah di dewan komisaris, ukuran dewan, kehadiran perempuan di dewan, dan keragaman etnis di dewan. Sedangkan variabel umur perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural umur perusahaan sejak berdirinya sampai dengan tahun pelaporan. Kualitas pelaporan keberlanjutan diukur menggunakan skala yang dikembangkan Aداui (2020). Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan laporan keberlanjutan periode 2014-2018. Pengujian tersebut memperoleh 185 observasi, yaitu 37 perusahaan dalam setahun yang diperoleh dari purposive sampling. Fixed Effect Model digunakan sebagai model estimasi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan usia perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Sedangkan variabel lainnya tentu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan Indonesia

**Kata kunci:** Karakteristik dewan, Kualitas pelaporan berkelanjutan, Usia perusahaan

### PENDAHULUAN

Penelitian terkait dengan permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia (Shamil *et al.* 2014). Hal ini sangat wajar mengingat perkembangan kependudukan dan dunia industri begitu cepat sehingga menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial (Chang *et al.* 2019). Fenomena ini menuntut perusahaan untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai aktivitasnya yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial (Manning *et al.* 2019). Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakomodir hal tersebut adalah dengan membuat Laporan Keberlanjutan (Hu & Loh 2018). Sehingga dapat dipahami bahwa pelaporan keberlanjutan telah berkembang menjadi suatu hal yang esensial bagi perkembangan pelaporan korporat (Stanny & Ely 2008).





Secara umum, praktik pelaporan keberlanjutan sebelum tahun 2019 masih bersifat sukarela (Amidjaya & Widagdo 2019), termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari situs OJK, diketahui bahwa pada tahun 2017 baru terdapat sekitar 9% perusahaan listing di Bursa yang membuat dan menerbitkan laporan keberlanjutan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketiadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode tersebut. Inisiatif dari pemerintah sendiri baru muncul pada tahun 2017, yaitu pada saat OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang merupakan tindak lanjut dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2014. Meskipun begitu, sebenarnya isu bisnis terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi perhatian utama berbagai perusahaan di Indonesia (Gunawan 2015). sebenarnya isu bisnis terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi perhatian utama berbagai perusahaan di Indonesia (Gunawan 2015) . Beberapa hal diduga menjadi pemicunya. Misalnya adalah isu mengenai angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Indonesia dan adanya arahan dari pemerintah yang menegaskan komitmen untuk mengajak semua dunia usaha agar terlibat dalam penanggulangan perubahan iklim terutama terkait dengan efek gas rumah kaca. Dengan demikian, hal-hal tersebut turut mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli terhadap pengungkapan aspek keberlanjutan di Indonesia.

Secara kuantitas pelaporan CSR di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia (KPMG International, 2013, 2015). Meskipun begitu, Amidjaya dan Widagdo (2019) sepakat dengan pernyataan Trireksani dan Djajadikerta bahwa praktek pengungkapan lingkungan dan sosial perusahaan Indonesia masih belum berada pada tahap maksimal karena masih terdapat kesalahpahaman mengenai peran dan tujuan dari pengungkapan itu sendiri. Kebanyakan perusahaan masih menganggap bahwa pengungkapan keberlanjutan hanyalah simbolis semata atau dengan kata lain pengungkapan tersebut hanya digunakan untuk memperoleh pengakuan publik semata (Amidjaya & Widagdo 2019). Padahal perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya pengungkapan CSR itu sendiri tetapi masih mencari justifikasi tentang manfaat dari pengungkapan CSR bagi perusahaan (Gunawan, 2015). Gunawan juga menambahkan bahwa tujuan utama dari perusahaan-perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Disclosure* adalah untuk menciptakan imej yang positif dan baik karena perusahaan tersebut meyakini bahwa imej sangatlah penting bagi keberlangsungan usaha mereka. Hal-hal tersebut tercermin pada fakta bahwa Indonesia berada di peringkat paling bawah dalam hal kualitas pelaporan keberlanjutan di antara negara anggota ASEAN (Loh *et al.*, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor apa saja yang sebenarnya dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Penyusunan pelaporan keberlanjutan merupakan proses yang memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang berperan secara strategis sehingga dapat dipastikan bahwa proses ini berkaitan erat dengan dewan (Hu & Loh, 2018). Terlebih lagi, dewan memiliki peran penting karena kedudukannya yang krusial dalam kerangka tata kelola perusahaan (Shamil *et al.*, 2014). Dewan berkontribusi guna memastikan semua keperluan dan kepentingan perusahaan berjalan secara efektif (Rathnayaka Mudiyansele, 2018). Dewan juga secara aktif terlibat dalam penyusunan strategi perusahaan karena mereka memiliki akses dan informasi material yang dibutuhkan dalam pelaporan keberlanjutan (Hu & Loh, 2018).

Sementara itu, menurut teori agensi dewan mewakili mekanisme pengendalian yang berguna untuk mengkomunikasikan kebutuhan pemegang saham dan para manajer sehingga tercipta sebuah sinergi yang berkesinambungan terkait dengan kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan (Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). Dewan berperan penting untuk memastikan kualitas dari data atau informasi yang disajikan sehingga bisa mengurangi informasi yang asimetris (Vitolla *et al.*, 2020). Karakteristik yang dimiliki dewan misalnya





independensi, ukuran, aktivitas dan keahlian seharusnya dapat dipertimbangkan untuk memahami pengaruhnya terhadap pelaporan keberlanjutan (Amidjaya & Widagdo, 2019). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dewan memiliki tanggung jawab dan peran yang signifikan dalam menjamin keberlangsungan hidup perusahaan sekaligus mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Bakar *et al.*, 2019). Dengan demikian, sangatlah penting untuk melakukan penelitian guna mengkaji pengaruh karakteristik dewan terhadap praktek ataupun kualitas dari pelaporan keberlanjutan.

Selain variabel *board characteristics*, penelitian ini juga menggunakan variabel usia perusahaan sebagai variabel bebasnya. Berdasarkan literatur revidi yang dilakukan oleh Dienes *et al.*, (2016) hanya terdapat sedikit studi yang melakukan kajian pengaruh variabel ini terhadap pelaporan keberlanjutan yang mana hasilnya pun kontradiktif satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa masih perlunya tambahan kajian untuk memahami pengaruh dari usia perusahaan terhadap pelaporan keberlanjutan.

Pemilihan Indonesia sendiri untuk penelitian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang praktek pelaporan keberlanjutannya masih cukup rendah (Diono *et al.*, 2017). Wanderley *et al.* dalam Shamil *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa penelitian pelaporan keberlanjutan di negara berkembang sangatlah penting karena keterbatasan informasiterkait dengan praktek pelaporan keberlanjutan. Kedua, kerangka tata kelola perusahaan di Indonesia menganut sistem two-tier board. Sistem ini berbeda dengan kebanyakan sistem yang dianut oleh negara-negara yang dijadikan objek penelitian pelaporan keberlanjutan sebelumnya sehingga sangat menarik untuk melihat bagaimana karakteristik dewan di Indonesia mempengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan. Ketiga, kualitas pelaporan keberlanjutan Indonesia masih sangatlah rendah (bahkan berada di posisi terbawah) apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya (Loh *et al.*, 2019). Hal ini tentunya menambah rasa keingintahuan tentang faktor apa saja yang sebenarnya dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai hubungan *corporate governance* dengan pelaporan keberlanjutan namun hanya sedikit yang memberikan hasil yang baik (Dienes *et al.*, 2016). Hal ini disebabkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut seringkali kontradiktif satu sama lain sehingga sangat sulit untuk mencapai konsensus mengenai pengaruh yang ditimbulkan. Sebagai contoh untuk aspek independensi dewan, Jizi *et al.* (2014), Hu dan Loh (2018), dan Rathnayaka Mudiyansele (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara independensi direktur terhadap pengungkapan CSR, namun Amran *et al.* (2014), Shamil *et al.* (2014), dan Said *et al.* (2009) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Awalia *et al.* (2015), Michael dan Lukman (2019) dan Ghabayen *et al.* (2016) justru menyatakan bahwa proporsi direksi independen berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu untuk aspek keberadaan wanita dalam dewan, hasil yang beragam pun diperoleh dari berbagai macam penelitian yang telah dilakukan. Glass *et al.* (2016), Rathnayaka Mudiyansele (2018) dan Mahmoud *et al.* (2018) menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam dewan mendorong kepemimpinan yang lebih baik sehingga menghasilkan kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik pula, namun Ghabayen *et al.* (2016) justru menyatakan sebaliknya. Adapun Shamil *et al.* (2014) dan Amran *et al.* (2014) menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam dewan tidak memiliki hubungan apapun dengan kualitas pelaporan keberlanjutan. Kontradiksi tersebut menandakan bahwa variabel-variabel tersebut memang sulit diperkirakan arah pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan sebab memang variabel tersebut memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi secara positif atau negative sehingga sangat menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut (Dienes *et al.*, 2016).





Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan uji empiris yang baik mengenai pengaruh karakteristik dewan dan usia perusahaan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan di konteks negara-negara penganut sistem *two-tier boards*, karena kebanyakan penelitian terkait pelaporan keberlanjutan mengambil objek penelitian di negara penganut sistem *one-tier boards* seperti yang dilakukan oleh Shamil *et al.* (2014), Rathnayaka Mudiyanlage (2018), Dissanayake *et al.* (2019) atau Hu dan Loh (2019). Kedua, penelitian ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh Shamil *et al.* (2014) ataupun Rathnayaka Mudiyanlage (2018) karena penelitian ini berfokus pada kualitas pelaporan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Shamil *et al.* (2014) dan Rathnayaka Mudiyanlage (2018) hanya menggunakan variabel dikotomi sebagai proksi yang menjelaskan pelaporan keberlanjutan sehingga tidak terlalu mencakup aspek kualitas pelaporan keberlanjutan

## KAJIAN PUSTAKA

### Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk membahas studi mengenai laporan keberlanjutan. Pertama, teori legitimasi. Teori ini menjelaskan perihal motivasi manajer dan organisasi terkait dengan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan terutama dalam hal kaitannya perolehan pengakuan dari masyarakat atau publik (Michael & Lukman, 2019). Ashforth dan Gibbs (dalam (Michelon *et al.*, 2015) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan perusahaan demi mendapatkan legitimasi yaitu pendekatan substantif dan simbolis. Apabila perusahaan menggunakan pendekatan substantif maka perusahaan akan benar-benar melakukan aksi nyata untuk memperoleh legitimasi tersebut, misalnya perubahan strategi ataupun kebijakan (Michelon *et al.*, 2015). Sementara itu apabila perusahaan menggunakan pendekatan simbolis maka perusahaan akan melakukan aksi yang mengarahkan persepsi atau opini pemangku kepentingan ke arah positif tanpa melakukan hal yang sebenarnya memang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa pendekatan simbolis merupakan sebuah tindakan seremonial belaka (Meyer dan Rowan dalam (Michelon *et al.*, 2015).

Kedua, teori yang relevan dengan studi ini adalah teori agensi. Teori ini menjelaskan penanganan permasalahan yang timbul dari hubungan agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini memberikan pemahaman untuk menyelesaikan permasalahan antara manajer dan para pemangku kepentingan dikarenakan adanya asimetris informasi, perilaku oportunistis ataupun benturan kepentingan karena teori agensi mempromosikan penggunaan tata laksana perusahaan yang efektif demi mengurangi permasalahan agensi (Hussain *et al.*, 2018). Dengan menggunakan perspektif ini, maka jelas bahwa perusahaan membutuhkan tingkat pengendalian yang memadai guna mengatasi permasalahan agensi sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan membutuhkan sebuah mekanisme pengendalian utama dalam perusahaan yang sebenarnya dapat direpresentasikan dengan keberadaan dewan (Vitolla *et al.*, 2020).

Selanjutnya, teori pandangan berbasis sumber daya merupakan pendekatan yang menekankan tentang pentingnya sumber daya internal organisasi dalam penyusunan strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi (Madhani, 2010). Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Edith Penrose pada tahun 1959. Edith Penrose menegaskan bahwa perkembangan kemajuan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dibatasi oleh sumber daya yang dimiliki oleh manajerial. Dalam perkembangannya, sumber daya kunci dapat dianggap sebagai sumber keuntungan kompetitif yang strategis apabila sumber daya tersebut langka, sulit untuk ditiru, tidak dapat digantikan, dan bernilai (Barney, 1991). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori ini berperan untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik internal perusahaan dengan kinerjanya dalam berbagai aspek (Branco & Rodrigues, 2006).





### Pengembangan Hipotesis

#### **Pengaruh usia anggota dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Usia merupakan salah satu atribut penting dalam karakteristik dewan karena dapat menentukan arah kepemimpinan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hal terjadi keseragaman usia di antara para dewan maka keputusan yang dibuat perusahaan belum tentu sesuai dengan berbagai segmen yang terdapat di pasar karena anggota dewan yang memiliki usia yang sebaya cenderung memiliki kemampuan ataupun informasi yang sama (Abdullah & Ismail, 2013). Selain itu, pada dasarnya kemampuan, keahlian, pengalaman, pengetahuan, serta kedewasaan dapat tercermin pada usia dari para anggota dewan (Hafsi & Turgut, 2013).

Dalam kaitannya dengan pelaporan keberlanjutan atau pengungkapan CSR, Kets de Vries (dalam Hafsi dan Turgut, 2013) menyampaikan bahwa semakin tua usia dari anggota dewan akan semakin sensitif terhadap permasalahan-permasalahan sosial sehingga akan memaksa perusahaan untuk peduli terhadap hal tersebut. Usia juga mempengaruhi perkembangan moral dari seseorang (Post *et al.*, 2011). Oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa usia anggota dewan memiliki pengaruh terhadap arah ataupun perspektif perusahaan terhadap pengungkapan dari aspek keberlanjutan.

Dalam perspektif pertumbuhan jiwa manusia, Hurlock (dalam (Kusumastuti & Sastra, 2007) menyatakan bahwa masa dewasa manusia terdiri dalam tiga tahap yaitu usia 18-40 tahun yang disebut sebagai dewasa dini, usia 40-60 tahun yang disebut sebagai dewasa madya dan usia 60 hingga kematian disebut sebagai dewasa lanjut. Puncak kemampuan berpikir dan fisik manusia berada pada usia 40 tahun sehingga setelah usia tersebut manusia akan mengalami penurunan (Kusumastuti & Sastra, 2007). Sehingga dapat dikatakan bahwa usia 40 tahun merupakan puncak dari manusia itu sendiri. Adapun setelah manusia mencapai usia 60 tahun, manusia akan cenderung lebih bijaksana karena manusia pada usia tersebut mengalami penurunan fisik yang drastis terutama dalam hal mengolah informasi dalam ingatan dan ini sangat dapat dipahami karena pada kenyataannya pada usia tersebut manusia seharusnya sedang mempersiapkan masa pensiunnya sendiri (Kusumastuti & Sastra, 2007). Hal ini didukung oleh bukti empiris yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka perilakunya akan lebih memiliki kesadaran akan pentingnya peran lingkungan (Sekaran & Bougie, 2017).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa semakin bertambah usia maka akan semakin bertambah pula kebijaksanaan seseorang. Jika diamati dari tahapan dewasa seseorang tersebut, maka seseorang yang berada pada kelompok usia dewasa lanjut merupakan masa ketika manusia berada dalam kondisi paling bijaksana dan sensitif. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

$H_1 =$  Usia anggota dewan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut sistem *two-tier* dalam tata laksana perusahaannya. Dengan demikian ada 2 (dua) bagian penting pada pucuk pimpinan perusahaan yaitu dewan komisaris dan direksi. Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, rapat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tata laksana perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah rapat atau pertemuan dari organ-organ penting perusahaan memiliki hubungan secara langsung dengan kebijakan perusahaan itu sendiri, termasuk kebijakan terkait dengan lingkungan (Harymawan *et al.*, 2020).

Frekuensi pertemuan dewan komisaris menggambarkan tingkat aktivitas dari dewan komisaris itu sendiri (Staden & Chen, 2010). Dewan komisaris memiliki peran untuk melakukan pengawasan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menggelar pertemuan pun





akan meningkat untuk melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan (Harymawan *et al.*, 2020). Akan tetapi, asumsi yang menyatakan bahwa semakin banyak pertemuan dewan komisaris akan mempengaruhi secara positif terhadap kualitas tata laksana perusahaan masih dapat dipertanyakan karena biaya koordinasi akan semakin meningkat dan bisa saja hal tersebut justru akan dimanfaatkan oleh dewan komisaris untuk memperbanyak rapat tanpa ada pembahasan yang signifikan bagi perusahaan (Dienes & Velte, 2016).

Dari sudut pandang teori agensi dan teori legitimasi, semakin tinggi frekuensi pertemuan dewan maka akan semakin menguntungkan para stakeholder karena biaya agensi akan semakin teratasi dan perolehan legitimasi akan semakin cepat (Dienes & Velte, 2016). Ditambah lagi di Indonesia terdapat peraturan yang mewajibkan dewan komisaris untuk melakukan pertemuan paling tidak satu kali dalam dua bulan sehingga hal tersebut akan memaksa dewan direksi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik terutama dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan ataupun pengungkapan CSR (Harymawan *et al.*, 2020). Sehingga hipotesisnya adalah:

H<sub>2</sub>= Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

### **Pengaruh jumlah rapat direksi terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Sama seperti dewan komisaris, direksi juga memegang peranan penting dalam tata kelola perusahaan baik terkait dengan strategi operasional perusahaan ataupun pengembangan strategi bisnis keberlanjutan (Harymawan *et al.*, 2020). Jizi *et al.* (dalam (Harymawan *et al.*, 2020) menjelaskan bahwa untuk memperoleh bisnis yang keberlanjutan perusahaan memerlukan direksi yang mampu bekerja secara efektif agar dapat menangani permasalahan terkait dengan aktivitas CSR perusahaan. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya para dewan membutuhkan pertemuan untuk melakukan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Jumlah pertemuan direksi merupakan gambaran mengenai kapasitas dan tingkat aktivitas yang dilakukan oleh para direksi yang berarti semakin banyak interaksi yang dilakukan maka pengawasan dan penyelesaian keinginan para pemangku kepentingan akan semakin mudah dilakukan (Hu & Loh, 2018; Widiyanto & Prastiwi, 2011). Beberapa peneliti juga menganggap bahwa jumlah pertemuan dewan dapat mempengaruhi tingkatan transparansi sekaligus kualitas pelaporan (Al-Shaer & Zaman, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertemuan direksi dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk berkomunikasi.

Menariknya, beberapa penelitian yang dilakukan menemukan hasil yang inkonklusif perihal pengaruh jumlah rapat direksi terhadap pelaporan keberlanjutan. Widiyanto dan Prastiwi (2011) dan Hu dan Loh (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari jumlah rapat dewan direksi terhadap pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, Harymawan *et al.* (2020) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Adapun Putri dan Sari (2013) dan Al-Shaer dan Zaman (2016) menyatakan bahwa jumlah rapat direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan. Ini menjelaskan bahwa variabel jumlah rapat direksi masih menarik untuk diteliti dan dicari hubungannya dengan kualitas pelaporan keberlanjutan terutama dalam konteks Indonesia.

Meskipun begitu, Harymawan *et al.* (2020) menyatakan bahwa pertemuan direksi tidak selalu meningkatkan efektivitas dan pengungkapan CSR di perusahaan dan ini bersumber dari dua argument. Pertama, terdapat beberapa bukti empiris yang menyatakan bahwa orang Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap lingkungan sehingga informasi yang diungkapkan akan sangat sulit dipahami secara efektif oleh para investor. Kedua, direksi pada dasarnya memahami dan memiliki akses terhadap informasi material





terkait kinerja keuangan yang dibutuhkan oleh pasar. Semakin sering pertemuan diadakan, maka perspektif direksi akan semakin menguat untuk mengatasi permasalahan utama perusahaan lainnya ketimbang informasi terkait dengan CSR. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

$H_3 =$  Jumlah rapat direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki afiliasi apapun dengan komisaris lainnya, dewan direksi, pemegang saham pengendali ataupun perusahaan sehingga orang tersebut bebas dari segala hal yang dapat mempengaruhi independensi dan netralitas dalam pengambilan keputusan (*International Finance Corporation*, 2014). Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris memberikan perspektif yang bebas dan netral dalam menjalankan fungsi-fungsi ataupun tugas yang diemban oleh dewan komisaris dalam perusahaan (Hidayat & Utama, 2017). Keberadaan komisaris independen, apabila berjalan dengan baik, akan mampu secara efektif dalam pengawasan atas kuantitas serta kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan perusahaan (Michael & Lukman, 2019). Meskipun masih belum terdapat konsensus di antara peneliti mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, keberadaan komisaris independen diyakini dapat meningkatkan kualitas transparansi karena diharapkan akan mampu mendorong manajemen puncak untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan pengungkapan aktivitas sosial yang dibutuhkan (Ghabayen *et al.*, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

$H_4 =$  Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh proporsi keberadaan eks-pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Di Indonesia, keberadaan eks pejabat pemerintahan dalam komisaris merupakan hal yang lumrah (Hidayat & Utama, 2017). Fenomena ini sama seperti yang dialami oleh korporat-korporat di Jepang. Fenomena ini dipelajari oleh Schaeede (1995) yang menyatakan bahwa paling tidak terdapat 3 implikasi yang dapat dipahami dari fenomena ini yaitu (1) Peraturan tertentu di Jepang mengarahkan fenomena eks pejabat pemerintahan ini; (2) Relasi yang dibawa oleh eks pejabat pemerintahan dapat memuluskan hubungan korporasi dengan pemerintah dan; (3) Fenomena ini menggambarkan strategi perusahaan-perusahaan multinasional sangat erat kaitannya dengan panduan yang diberikan oleh pemerintah.

Tujuan utama dari keberadaan eks pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris adalah untuk menyelaraskan strategi-strategi korporasi agar sejalan dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah (Schaeede, 2013). Keberadaan eks pejabat pemerintahan akan membantu perusahaan dalam memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintahan sehingga dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaporan korporat, termasuk pelaporan keberlanjutan. Namun sayangnya, penelitian yang mengamati pengaruh keberadaan eks pejabat pemerintahan terhadap pelaporan keberlanjutan sangat sulit untuk ditemui di Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

$H_5 =$  Proporsi keberadaan eks-pejabat pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh proporsi keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Pejabat pemerintahan didefinisikan sebagai pejabat pada pemerintah pusat (kementerian dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat), provinsi, militer, dan badan usaha milik





negara atau daerah (Hidayat & Utama, 2017). Sama seperti keberadaan eks pejabat pemerintahan, peran dari keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris diperkirakan memiliki peran yang signifikan dalam menyelaraskan tujuan pemerintah dengan tujuan bisnis perusahaan. Sebagai perwakilan dari pemegang saham, tentunya keberadaan pejabat pemerintahan akan menuntut perusahaan untuk lebih transparan terkait dengan informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

$H_6$ = Proporsi keberadaan pejabat pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh ukuran dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Dalam perspektif teori agensi, semakin besar ukuran dewan akan semakin mudah melakukan pengawasan dan akan semakin efektif pula proses tersebut, namun ukuran dewan yang terlalu besar dapat juga berakibat negatif karena mempersulit komunikasi dan koordinasi di antara para anggota dewan sehingga menyebabkan pengawasan yang tidak efisien (Veronica Siregar & Bachtiar, 2010). Ini dapat dipahami karena semakin besar ukuran dewan maka waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan akan semakin meningkat sehingga dinamisme tata laksana perusahaan pun akan semakin berkurang.

Meskipun begitu, hasil empiris membutuhkan bahwa memang terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai pengaruh ukuran anggota dewan terhadap pengungkapan keberlanjutan. Pandangan pertama yang didukung oleh De Viliers *et al.* (2011), Ntim dan Soobaroyen (2013), Shamil *et al.* (2014), dan Rathnayaka (2018) menyatakan bahwa ukuran anggota dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sementara itu, pandangan kedua yang didukung oleh Said *et al.* (2009), menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari ukuran anggota dewan terhadap pengungkapan keberlanjutan. Perbedaan kedua pandangan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel, tahun pengolahan data, dan jenis perusahaan yang dijadikan sebagai sampel. Sehingga hipotesisnya adalah:

$H_7$ = Ukuran dewan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh keberadaan wanita dalam dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Penelitian mengenai peran keberadaan wanita dalam dewan terhadap pelaporan keberlanjutan memberikan pemahaman bahwa keberadaan wanita dalam dewan meningkatkan kualitas dari pelaporan keberlanjutan (Al-Shaer & Zaman, 2016; Arayssi *et al.*, 2016). Hal ini disebabkan oleh wanita memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi ketimbang pria (Bear *et al.*, 2010; Hafsi and Turgut, 2013; Isidro and Sobral, 2014) terutama pada pencapaian misi tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sehingga akan mendorong perusahaan untuk lebih peduli pada kepentingan amal (Wang dan Coffey, 1992; Williams, 2003). Selain itu, Manetti dan Tocafondi (2012) juga menjelaskan bahwa keberadaan wanita dalam struktur tata kelola akan membantu perbaikan pada mekanisme tata kelola serta meningkatkan kredibilitas laporan yang dibuat oleh perusahaan. Wanita juga memiliki orientasi terhadap kepentingan para *stakeholder* yang menyebabkan wanita cenderung memiliki keinginan untuk melindungi perusahaan dari risiko-risiko yang mungkin akan diterima perusahaan (Adams and Ferreira, 2009). Sehingga hipotesisnya adalah sebagai berikut.

$H_8$ = Proporsi keberadaan wanita dalam dewan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

#### **Pengaruh keberagaman etnis dalam dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Keberagaman etnis pada dewan oleh publik dianggap sebagai indikator bahwa perusahaan memiliki tingkat kepedulian sosial yang baik (Miller & Triana, 2009). Selain itu, dengan adanya diversitas etnis dalam dewan tentunya akan memberikan perspektif pemikiran





yang berbeda-beda dalam kontribusinya bagi kinerja dewan karena sebagaimana dikatakan oleh Harris (dalam Hamzah *et al.*, 2015) bahwa kemampuan berfikir dan perilaku seseorang sangatlah tercermin dari budaya yang dibawanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberagaman etnis pada dewan akan memberikan impresi yang baik bagi publik dan kontribusi heterogenitas pemikiran bagi dewan dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa keberagaman etnis pada struktur dewan akan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Para peneliti sendiri masih belum memiliki konsesus atas pengaruh keberagaman etnis pada dewan terhadap laporan keberlanjutan. Shamil *et al.* (2014), Rathnayaka (2018), dan Bakar *et al.* (2019) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, Ntim dan Soobaroyen (2013), dan Zhang (2012) menyatakan hal yang sebaliknya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H<sub>9</sub>= Keberagaman etnis dalam dewan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

### **Pengaruh usia perusahaan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Berdasarkan revidi sistematis yang dilakukan oleh Dienes *et al.* (2016), diketahui bahwa Usia Perusahaan merupakan salah satu variabel yang jarang digunakan dalam penelitian terkait pengungkapan CSR. Dienes *et al.* (2016) mengungkapkan tercatat hanya terdapat 3 penelitian yang menggunakan Usia Perusahaan sebagai variabel penelitian. Hasil yang diperoleh pun inkonklusif karena terdapat perbedaan hasil analisis di antara ketiganya. Beberapa studi menemukan bahwa semakin bertambahnya usia perusahaan maka akan semakin berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR (Bayoud *et al.*, 2012a). Sementara itu, peneliti lainnya justru menemukan hal yang sebaliknya (M. Shamil *et al.*, 2014; Marquis & Qian, 2014). Perbedaan hasil temuan tersebut sebenarnya mengindikasikan bahwa variabel ini masih perlu untuk diteliti lebih jauh lagi terutama dalam konteks perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut..

H<sub>10</sub>= Usia perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

## **METODE**

### **Data dan sampel**

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diambil berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan terintegrasi perusahaan di Indonesia dalam periode 2014-2018. Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan populasi dan sampel yang memang diperlukan. Populasi adalah keseluruhan kelompok orang ataupun objek yang merupakan pusat perhatian peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Sementara itu, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sekaran & Bougie, 2016; Sugiyono, 2011).

### **Model Penelitian**

Berdasarkan hipotesis yang dibangun dalam landasan teori dan variabel-variabel yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, maka model penelitian awal sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 SRQ_{i,t} = & \alpha_{0,i,t} + \beta_1 BDAGE_{i,t} + \beta_2 BOCMEET_{i,t} + \beta_3 BODMEET_{i,t} \\
 & + \beta_4 KOMIND_{i,t} + \beta_5 EXGOVOFF_{i,t} + \beta_6 CURGOVOFF_{i,t} \\
 & + \beta_7 BDSIZE_{i,t} + \beta_8 BFD_{i,t} + \beta_9 BE_{i,t} + \beta_{10} FAGE_{i,t} + \beta_{11} FSIZE \\
 & + \beta_{12} IND + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

SRQ = Kualitas Pelaporan Keberlanjutan

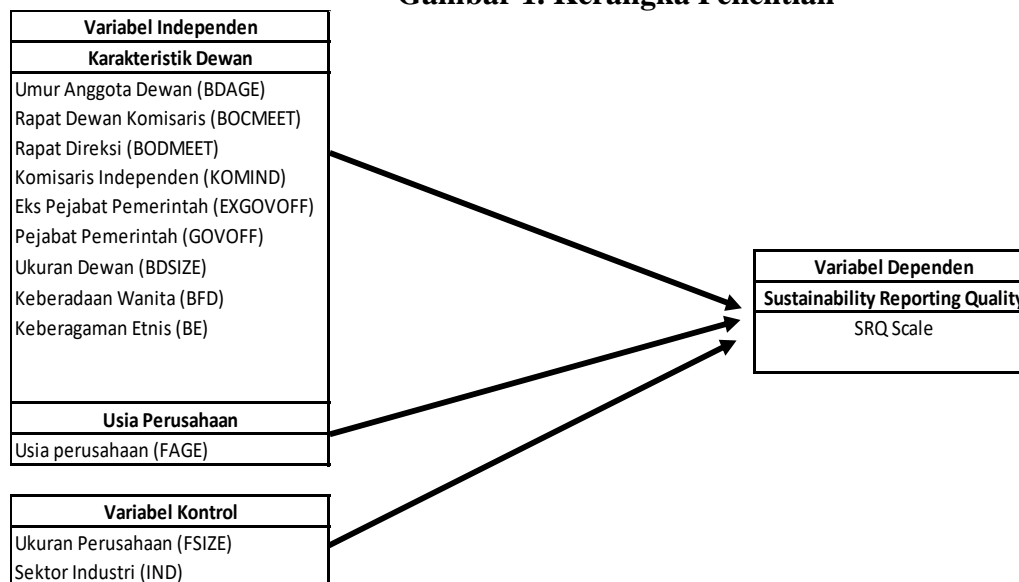




- BDAGE = Usia anggota dewan (proporsi anggota dewan berusia > 60 tahun)
- BOCMEET = Jumlah rapat dewan komisaris dalam satu tahun operasional
- BODMEET = Jumlah rapat direksi dalam satu tahun operasional
- KOMIND = Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris
- EXGOVOFF = Proporsi eks-pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris
- CURGOVOFF = Proporsi pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris
- BDSIZE = Jumlah anggota dewan komisaris dan direksi (logaritma natural)
- BFD = Proporsi keberadaan wanita dalam dewan
- BE = Variabel dummy dari keberagaman etnis dewan
- FAGE = Usia perusahaan
- FSIZE = Ukuran perusahaan (logaritma natural total aset perusahaan)
- IND = Variabel dummy dari sensitivitas industri
- $\varepsilon$  = Error
- $\alpha$  = Konstanta

Untuk memudahkan pemahaman hubungan antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen, maka digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Penelitian**



Sumber: data diolah penulis (2020)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Pemilihan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* terhadap seluruh data perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2018. Berdasarkan tahapan-tahapan pemilihan sampel yang telah dilakukan terdapat 37 perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian dengan rincian:

**Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel**

Nomor	Kriteria	Total	Ukuran
1	Perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 2020 (per 7 Juli 2020)	693	Perusahaan
2	Perusahaan baru terdaftar, diambil alih, atau dimerger setelah tahun 2014	207	Perusahaan





3	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keberlanjutan atau laporan tahunan terintegrasi pada periode 2014-2018	419	Perusahaan
4	Perusahaan yang menyampaikan laporan keberlanjutan atau laporan tahunan terintegrasi tetapi tidak lengkap pada periode 2014-2018	30	Perusahaan
5	Perusahaan yang menyampaikan data-data variabel penelitian tidak lengkap	0	Perusahaan
Total Sampel		37	Perusahaan
Tahun		5	Tahun
Jumlah Observasi		185	Perusahaan-Tahun

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 185 data statistik yang bersumber dari data 37 perusahaan sampel dalam periode 5 tahun (2014-2018). Rendahnya jumlah sampel tersebut dikarenakan sifat pelaporan keberlanjutan yang masih sukarela pada periode tersebut. Pengaturan tentang kewajiban pelaporan keberlanjutan sendiri baru diatur secara jelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 yang baru mewajibkan pelaporan keberlanjutan bersifat wajib untuk disampaikan bagi perusahaan terdaftar di Bursa mulai tahun 2020.

### Deskripsi Statistik

Statistik deskriptif merupakan bentuk statistik yang berupa frekuensi, rata-rata, dan standar deviasi dari suatu data yang berfungsi untuk memberikan informasi deskriptif atau gambaran garis besar mengenai suatu data (Sekaran & Bougie, 2017).

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Std Dev	Min	Max
Kualitas Pelaporan Keberlanjutan	185	2.547475	0.303110	1.494949	3.000000
Usia Dewan	185	0.235170	0.129056	0.000000	0.600000
Rapat Dewan Komisaris	185	2.241644	0.690784	0.693147	4.158883
Rapat Direksi	185	3.408691	0.582307	1.098612	5.236442
Keberadaan Komisaris Independen	185	0.421015	0.113749	0.166667	0.800000
Keberadaan Eks Pejabat Pemerintah Dalam Dewan Komisaris	185	0.274917	0.247916	0.000000	1.000000
Keberadaan Pejabat Pemerintah Dalam Dewan Komisaris	185	0.252177	0.249626	0.000000	0.833333
Jumlah Anggota Dewan	185	2.581284	0.236065	1.791759	3.135494
Keberadaan Wanita	185	0.096231	0.105399	0.000000	0.500000
Keberagaman Etnis	185	0.972973	0.162602	0.000000	1.000000
Usia Perusahaan	185	3.772936	0.413416	2.639057	4.488636
Ukuran Perusahaan	185	31.389710	1.485111	28.373336	34.798750
Sensitivitas Industri	185	0.567568	0.496758	0.000000	1.000000

Sumber: Diolah oleh Penulis





### Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan ketiga uji pemilihan model regresi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* yang terpilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Simpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil uji *Breusch Pagan Lagrange Multiplier* diketahui bahwa *Random Effect Model* lah yang terpilih. Kemudian berdasarkan hasil uji *Hausman* diketahui bahwa *Fixed Effect Model* yang terpilih. Hal ini dipertegas dengan hasil uji *Chow* yang juga menentukan bahwa *Fixed Effect Model* yang terpilih sebagai model regresi dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, diketahui bahwa penelitian ini masih memiliki masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masalah asumsi klasik ini harus diselesaikan dengan baik karena permasalahan asumsi klasik dapat menyebabkan bias dalam analisis statistika inheren (Hoechle, 2007). Hoechle (2007) menambahkan bahwa untuk mengatasi permasalahan asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan/atau autokorelasi peneliti dapat mengandalkan *robust standard errors*. Untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi diperlukan juga penyesuaian terhadap *standar errors* berdasarkan *cluster* dalam panel data penelitian (Rogers, 1993). Pada aplikasi Stata, penyesuaian *robust standard errors* berdasarkan *cluster* dapat dieksekusi dengan menggunakan perintah *xtreg, fe cluster ( )* (Hoechle, 2007).

Tabel 3 berikut ini menunjukkan bahwa penyesuaian *standard errors* berdasarkan *cluster* tidak menyebabkan perubahan pada koefisien (beta) dari tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Perintah *xtreg, fe cluster* secara detil melakukan penyesuaian terhadap *standard errors* tiap-tiap variabel dengan berdasarkan pada group/kluster dalam penelitian ini, yaitu *idcompany*. Model estimasi yang telah dirobust *standard error*-nya inilah yang akan dipakai untuk keperluan analisis selanjutnya.

**Tabel 3. Hasil *Adjusted Standard Error via Cluster***

Variabel	Std. Err	Robust Std. Err
BDAGE	0.1980236	0.2439850
BOCMEET	0.0368941	0.0401230
BODMEET	0.0503152	0.0338228
KOMIND	0.2195591	0.1784995
EXGOVOFF	0.1827474	0.1822320
CURGOVOFF	0.2057273	0.1932343
BDSIZE	0.1292545	0.1302352
BFD	0.3039661	0.2576114
BE	(omitted)	(omitted)
FAGE	0.4117905	0.3965915
IND	(omitted)	(omitted)
FSIZE	0.0650138	0.0615636
_cons	0.1087495	0.0691320

Sumber : Diolah oleh Penulis (2020)

### Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini prediksi arah telah dibuat untuk variabel BDAGE, BOCMEET, BODMEET, KOMIND, EXGOVOFF, CURRGGOVOFF, BDSIZE, BFD, BE, dan FAGE. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independent terhadap variabel dependen, diperoleh hasil sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis**





Variabel	Prediksi Arah	Coef.	P>t (one-tailed test)	Simpulan
BDAGE	+	0.0584	0.4060	Hipotesis ditolak
BOCMEET	+	-0.0343	0.1990	<b>Hipotesis diterima</b>
BODMEET	-	0.0984	0.003***	Hipotesis ditolak
KOMIND	+	0.1594	0.1890	Hipotesis ditolak
EXGOVOFF	+	0.1394	0.2245	Hipotesis ditolak
CURGOVOFF	+	0.1490	0.2230	Hipotesis ditolak
BDSIZE	+	0.2628	0.025**	<b>Hipotesis diterima</b>
BFD	+	0.1939	0.2285	Hipotesis ditolak
BE	+	0.0000	-	Hipotesis ditolak
FAGE	+	0.8634	0.018**	<b>Hipotesis diterima</b>
IND	+	0.0000	-	Hipotesis ditolak
FSIZE	+	0.1557	0.0080***	<b>Hipotesis diterima</b>
_cons		2.4391	0.0000***	

\*\*\*signifikan pada 1%, \*\*signifikan pada 5%, \* signifikan pada 10%  
*Prob F-Stat* =0,00009 dan *R-squared* =0,2154

Sumber: data diolah penulis (2020)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 di atas, variabel BODMEET, BDSIZE, FAGE, dan FSIZE memiliki nilai P>t lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BODMEET, BDSIZE, FAGE, dan FSIZE memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan sampel. Hasil uji statistik F pada model penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $Prob>F$  adalah sebesar 0.0009. Nilai uji statistik F pada model penelitian ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0.05. Ini menandakan bahwa model penelitian dapat diterima dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Adapun *R-squared* menunjukkan angka 0,2154. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel penelitian dalam penelitian ini mampu menjelaskan 21,54% variasi laporan keberlanjutan, sementara sebesar 78,46% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

## Diskusi

### Pengaruh usia anggota dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa usia anggota dewan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata proporsi keberadaan anggota dewan yang berusia lebih atau sama dengan 60 tahun berada pada porsi 23.52%. Artinya secara umum keberadaan anggota dewan yang berusia lebih atau sama dengan 60 tahun lebih rendah daripada dengan keberadaan anggota dewan yang lebih muda yang menyebabkan pengaruh dari dewan yang berusia lebih atau sama dengan 60 tahun relatif lebih kecil. Anggota dewan yang lebih muda memiliki kecenderungan untuk beranggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan, misalnya lingkungan dan/atau isu etika, dari sudut pandang logika dan peraturan (Hafsi & Turgut 2013, 5). Artinya generasi direktur ataupun komisaris yang lebih muda akan memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih logis sehingga apabila hal tersebut tidak menguntungkan perusahaan atau tidak diwajibkan oleh peraturan, maka perusahaan tidak akan terlalu fokus terhadap hal tersebut. Bukti bahwa keberadaan anggota dewan yang berusia 60 tahun atau lebih tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan dapat diamati pada data PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, PT Astra Argo Lestari memiliki nilai variabel BDAGE sebesar 0.36364 dengan nilai SRQ sebesar 2.5960. Sementara itu PT Astra Argo





Lestari Tbk pada tahun 2016 memiliki nilai variabel BDAGE sebesar 0.27273 dan memiliki nilai SRQ sebesar 2.5960.

Dari perspektif teori pandangan berbasis sumber daya, karakteristik yang dewan miliki merupakan sumber daya tak berwujud bagi perusahaan yang bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik (Madhani 2019). Usia anggota dewan merupakan bagian dari sumber daya tak berwujud bagi perusahaan. Semakin bertambahnya usia para anggota dewan tentunya akan semakin mencerminkan perihal pengalaman dan kemampuannya dalam mengelola perusahaan sehingga mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun, sayangnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi atau komisaris yang berusia 60 tahun atau lebih bukanlah merupakan sumber daya idiosinkratik yang bisa memberikan keunggulan perihal kualitas pelaporan keberlanjutan. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang tercermin pada usia anggota dewan tidak memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini mungkin terjadi karena keberadaan dewan direksi atau komisaris yang berusia 60 tahun atau lebih cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis perusahaan, misalnya koneksi dan pengalaman, daripada untuk pelaporan keberlanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakar *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dewan yang memiliki usia rata-rata lebih atau sama dengan 60 tahun dengan dewan yang tidak memiliki usia rata-rata lebih atau sama dengan 60 tahun dalam hal kualitas pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menarik karena ini menunjukkan perbedaan dengan pendapat-pendapat yang mendasari mengenai pengaruh usia dewan terhadap pelaporan keberlanjutan. Secara umum, usia mencerminkan mengenai pengalaman bisnis dan juga merupakan bukti mengenai kematangan dalam mengarahkan perusahaan (Hafsi & Turgut, 2013). Post *et al.* (dalam (Hafsi & Turgut, 2013) menambahkan usia dewan memiliki pengaruh yang jelas terhadap kebijakan filantropis perusahaan. Semakin bertambahnya usia anggota dewan maka sikap ataupun kebijakan mereka akan menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan dan masyarakat dan itu akan mendorong mereka untuk menjadi lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar (Kets De Vries & Miller, 1984). Namun, hal itu tidak terjadi dalam sampel penelitian ini. Ini mengindikasikan bahwa peran-peran dari para anggota dewan yang memiliki usia 60 tahun atau lebih terhadap kebijakan strategis perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak signifikan.

### **Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil studi memperlihatkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki dampak terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah rapat dewan komisaris berada pada level 12 (dua belas) rapat per tahun. Data tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Namun, hal tersebut pun dapat dimaknai sebagai bentuk kepatuhan semata dari perusahaan sampel terhadap ketentuan yang mengatur mengenai rapat dewan komisaris. Penting untuk diketahui bahwa peran dewan komisaris sebenarnya adalah untuk melakukan pengawasan dan advis terhadap direksi serta kinerja perusahaan. Sehingga aktivitas rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris diduga lebih memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pengawasan tersebut daripada untuk perumusan kebijakan strategis perusahaan. Terlebih lagi, dengan adanya ketentuan rapat dewan komisaris yang *mandatory* justru semakin menegaskan bahwa terdapat indikasi bahwa jumlah rapat dewan komisaris memang dilakukan sebatas untuk fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan saja. Bukti ini dapat dilihat dengan membandingkan data PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, PT Astra Argo Lestari Tbk menyelenggarakan 4 rapat dewan komisaris dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.5960. Sementara





itu, PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2016 menyelenggarakan 6 rapat dewan komisaris dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.5960.

Dalam perspektif teori agensi, dewan komisaris memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari pemilik (pemegang saham). Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari para direksi dalam menjalankan perusahaan atau dengan kata lain dewan komisaris bertugas untuk menyelaraskan kinerja direksi agar tetap sesuai dengan keinginan dari para pemilik (pemegang saham). Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya tentunya perlu melakukan pertemuan-pertemuan internal yang sekiranya bisa membantu pencapaian target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Menilik pada perspektif ini, maka dapat dikatakan bahwa laporan keberlanjutan perusahaan sampel bukanlah merupakan prioritas yang diinginkan atau dijadikan target oleh pemegang saham sehingga aktivitas dari dewan komisaris tidak menjadikan laporan keberlanjutan sebagai sasaran utama dalam pengawasan kebijakan strategis perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Harymawan *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Harymawan *et al.* (2020) menjelaskan bahwa peran yang dimiliki dewan komisaris terhadap aktivitas operasional perusahaan adalah peran yang bersifat tidak langsung sehingga hal tersebut membuktikan bahwa dewan komisaris bukanlah pihak yang semata-mata bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan. Rapat dewan komisaris tidak selalu melakukan pembahasan terkait dengan laporan keberlanjutan ataupun laporan tanggung jawab sosial perusahaan, biasanya terdapat hal-hal yang lebih penting lainnya yang berkaitan dengan bisnis perusahaan itu sendiri (Harymawan *et al.* 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris pada perusahaan Indonesia tidak memiliki korelasi yang kuat pada perumusan kebijakan keberlanjutan perusahaan. Bagi dewan komisaris, pelaporan keberlanjutan bukanlah merupakan prioritas permasalahan yang harus dibahas dengan segera karena masih terdapat fokus prioritas lainnya yang harus cepat diselesaikan.

#### **Pengaruh jumlah rapat direksi terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rapat direksi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat direksi memiliki rata-rata sebesar 35 rapat per tahun. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan, perusahaan sampel pada penelitian ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik mengenai jumlah rapat minimum yang harus dilakukan oleh direksi dalam satu tahun yaitu sebanyak 12 (dua belas) rapat per tahun atau 1 (satu) kali rapat tiap 1 (satu) bulan. Selain itu, perlu dipahami bahwa tugas utama dari direksi adalah untuk merumuskan kebijakan strategis perusahaan. Dalam mewujudkan hal tersebut maka besar kemungkinan para direksi melakukan koordinasi yang dilakukan melalui rapat direksi.

Semakin sering direksi berkoordinasi maka kemungkinan kualitas pembahasan yang dilakukan pun akan semakin meningkat sehingga hal ini pun berdampak pada kualitas pelaporan keberlanjutan sebagai salah satu media pertanggungjawaban kebijakan strategis perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan data PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk pada tahun 2014 dan 2018 pada tahun 2015. PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk pada tahun 2014 memiliki jumlah rapat direksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.3030. Sementara itu, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk pada tahun 2018 memiliki jumlah rapat direksi sebanyak 24 kali dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6162.





Dari perspektif teori legitimasi, hasil penelitian ini menandakan bahwa aktivitas rapat yang dilakukan oleh direksi ternyata patut diduga menyakini bahwa laporan keberlanjutan sebagai salah satu alat untuk memperoleh legitimasi dari pihak luar perusahaan. Artinya dalam rapat-rapat direksi tersebut laporan keberlanjutan juga dijadikan sebagai salah satu fokus perhatian dari para direksi karena laporan keberlanjutan itu sendiri merupakan manifestasi dari kebijakan strategis dan berkelanjutan dari perusahaan dan dapat membantu perusahaan memperoleh legitimasi dari pihak eksternal perusahaan. Semakin tinggi intensitas atau frekuensi rapat direksi mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau sering juga pembahasan mengenai strategi-strategi keberlanjutan perusahaan untuk kemudian dituangkan ke dalam laporan keberlanjutan. Rapat-rapat yang dilakukan oleh direksi seringkali membahas tentang mekanisme perusahaan dalam merumuskan strategi dalam menjaga hubungannya dengan pihak-pihak eksternal perusahaan yang mengedepankan unsur transparansi dan relevansi (Herremans *et al.*, 2016). Dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat direksi dapat meningkatkan efektifitas direksi dalam melakukan pembahasan yang strategis dan berkualitas mengenai strategi keberlanjutan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hu dan Loh (2018), Naseem *et al.* (2017), dan Jizi *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa jumlah rapat direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Ini menandakan bahwa semakin sering atau tinggi frekuensi rapat yang dilakukan oleh anggota direksi maka akan semakin tinggi pula kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan tersebut.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Harymawan *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa jumlah rapat direksi memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Perbedaan ini disebabkan oleh penelitian yang dilakukan Harymawan *et al.* (2020) menggunakan proksi CSRD yang disusun berdasarkan kriteria pengungkapan yang diterbitkan oleh GRI, sementara itu penelitian ini menggunakan *Sustainability Report Quality Scale* yang disusun oleh Adauy (2020) berdasarkan penjelasan yang dibuat oleh Helfaya *et al.* (2018).

### **Pengaruh proporsi keberadaan komisaris independen terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa proporsi keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Hasil uji hipotesis tersebut didukung dengan data statistik deskriptif. Secara rata-rata, proporsi komisaris independen pada perusahaan sampel berada pada level 42%. Hal ini menandakan bahwa secara kuantitas komisaris independen masih kalah dengan anggota komisaris lainnya sehingga pengaruhnya terhadap perumusan kebijakan strategis dan berkelanjutan perusahaan pun tidak signifikan. Hal ini diperkuat dengan melakukan perbandingan antara data PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, PT Astra Internasional Tbk memiliki proporsi komisaris independen sebesar 0.38462 dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6162. Sementara itu, pada tahun 2018 PT Astra Internasional Tbk memiliki proporsi komisaris independen sebesar 0.3000 dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6162. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Dari perspektif teori pandangan berbasis sumber daya, hasil penelitian ini menandakan bahwa keberadaan komisaris independen di perusahaan Indonesia belum membawa keunikan yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan.





Peran komisaris independen di perusahaan Indonesia belum memberikan dampak strategis bagi perusahaan terutama dalam hal menjaga kualitas pelaporan keberlanjutannya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan perihal pelaporan keberlanjutan sehingga perannya belum terasa signifikan bagi kualitas pelaporan keberlanjutan. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen di perusahaan Indonesia belum menjadi faktor pembeda bagi perusahaan, terutama perihal kebijakan strategis perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) dan Rohmah (2016) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan. Terdapat beberapa dugaan alasan mengapa hal ini dapat terjadi. Ratnasari dalam (Rohmah 2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen dalam perusahaan masihlah rendah sehingga kinerjanya dalam melakukan monitoring ataupun supervisi perihal laporan keberlanjutan juga rendah. Hal ini dibuktikan dengan statistik deskriptif penelitian ini yang menyatakan bahwa rata-rata keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris adalah sebesar 42.10% dari total komisaris dalam perusahaan-perusahaan sampel.

Rohmah (2016) juga menambahkan bahwa terdapat indikasi mengenai pemilihan dan pengangkatan komisaris independen yang berjalan kurang baik sehingga komisaris independen yang ditunjuk tidak dapat menunjukkan independensinya dalam menjalankan pekerjaannya secara efektif terutama dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan.

Selain itu, Restuningdiah dalam Aniktia & Khafid (2015) juga menjelaskan bahwa komisaris independen tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan karena komisaris independen tidak memiliki waktu yang cukup di sela-sela aktivitas atau pekerjaan utamanya. Hal ini menyebabkan keberadaan komisaris independen menjadi tidak efektif, terutama dalam hal pelaporan keberlanjutan.

Lebih lanjut lagi, Aniktia & Khafid (2015) menyatakan sepakat dengan pendapat Stranberg (dalam Restuningdiah 2010) bahwa kompetensi komisaris independen juga memegang peranan penting dalam menjelaskan pengaruh komisaris independen terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Komisaris independen yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait dengan pelaporan keberlanjutan akan memiliki peran yang tidak signifikan pula terkait dengan kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, fenomena ini juga kemungkinan dapat dikaitkan dengan fakta bahwa keberadaan komisaris independen ini bersifat *mandatory* atau diwajibkan oleh peraturan yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa keberadaan komisaris independen ini hanya dilakukan sebatas untuk memenuhi ketentuan formal belaka.

### **Pengaruh keberadaan eks pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa proporsi keberadaan eks pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan eks pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan pada data statistik deskriptif sampel yaitu dengan membandingkan data PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, PT Aneka Tambang Raya memiliki proporsi keberadaan eks pejabat pemerintahan sebesar 0.1667 dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 3.0000. Sementara itu, pada tahun 2015 PT Aneka Tambang Tbk memiliki proporsi keberadaan eks pejabat pemerintahan sebesar 0.3333 dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 3.0000. Hal ini membuktikan bahwa proporsi keberadaan eks pejabat pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.





Dari perspektif teori pandangan berbasis sumber daya, hasil penelitian ini menandakan bahwa keberadaan eks pejabat pemerintahan belum membawa sumber daya yang maksimal dan signifikan bagi perusahaan dalam hal kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tidak semua anggota dewan eks pejabat pemerintahan memiliki pemahaman yang tepat dan memadai mengenai kebijakan strategis perusahaan. Kemungkinan lainnya adalah terdapat keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh para anggota komisaris yang merupakan eks pejabat pemerintahan sehingga belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif teori agensi, fungsi eks pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris secara umum biasanya merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham pengendali dari perusahaan tersebut yang biasanya merupakan pemerintah. Keberadaan eks pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris tentunya untuk menjamin agar pengawasan terhadap manajemen dapat berjalan dengan efektif dan manajemen dapat bekerja sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai saham pengendali. Dengan demikian apabila ditinjau dari perspektif teori agensi, dapat dipahami bahwa tugas dari keberadaan eks pejabat pemerintah itu terbatas pada pengawasan kinerja manajemen agar tetap sesuai dengan keinginan pemilik, dalam hal ini pemerintah. Schaeede (2013) menyatakan bahwa fenomena mempekerjakan eks pejabat pemerintahan di pucuk pimpinan didorong oleh beberapa motivasi yang terkait dengan tiap-tiap pemangku kepentingan. Dari sudut pandang pemerintah, orang-orang tersebut diharapkan dapat menjaga implementasi dari peraturan-peraturan terkait. Dari sudut pandang orang itu sendiri, orang tersebut ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Dari sudut pandang korporasi, keberadaan eks pejabat pemerintah ditujukan untuk (1) memastikan akses terhadap informasi-informasi tersembunyi dari pemerintah; (2) menjadi penengah apabila terjadi pertentangan dengan pemerintah; dan (3) untuk melakukan lobi-lobi penting perihal penerapan peraturan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan eks pejabat pemerintah dalam dewan komisaris pada perusahaan yang menjadi sampel masih berkuat di area bisnis dan kepentingan dari pemilik (pemegang saham). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fokus dari pemerintah sebagai pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham lainnya bukanlah terletak pada bagaimana perusahaan merumuskan kebijakannya, tetapi lebih kepada bagaimana perusahaan mampu mencapai target kinerja jangka pendek yang telah ditetapkan.

### **Pengaruh keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa proporsi keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan pada data statistik deskriptif sampel yaitu dengan membandingkan data PT Astra International Tbk untuk tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, PT Astra International Tbk memiliki proporsi keberadaan pejabat pemerintah dalam dewan komisaris sebesar 0.0833 dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6162. Sementara itu PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2017 juga memiliki proporsi keberadaan pejabat pemerintah dalam dewan komisaris sebesar 0.07692 namun memiliki nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6162. Perbandingan tersebut membuktikan bahwa proporsi keberadaan pejabat pemerintah dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Dari perspektif teori pandangan berbasis sumber daya, hasil penelitian ini menandakan bahwa keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris tidak membawa dampak positif bagi pelaporan keberlanjutan perusahaan. Atribut-atribut ataupun karakteristik yang





dimiliki oleh pejabat pemerintahan tidak berkorelasi dengan bagaimana perusahaan menyampaikan laporan keberlanjutannya. Selain disebabkan oleh keterbatasan kompetensi terkait dengan pelaporan keberlanjutan perusahaan, hal ini juga dapat dijelaskan dengan fakta bahwa para anggota dewan komisaris yang merupakan pejabat pemerintahan masih memiliki pekerjaan utama ketika diangkat sebagai anggota dewan komisaris. Dengan demikian, sumber daya yang pejabat tersebut miliki akan terbagi menjadi dua yaitu kepada pekerjaan utamanya dan pekerjaan sebagai komisaris di perusahaan. Tentunya perlu disadari bahwa para anggota dewan komisaris yang merupakan pejabat pemerintahan ini menghabiskan sebagian besar waktunya pada pekerjaan utamanya sebagai pejabat pemerintah. Perannya dalam dewan komisaris pun menjadi terbatas karena adanya batasan waktu dan energi yang pejabat tersebut miliki. Sehingga dapat dipahami apabila keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris belum mampu memberikan dampak positif terhadap kebijakan strategis dan keberlanjutan perusahaan.

Apabila ditinjau dari teori agensi, peran keberadaan pejabat pemerintah dalam dewan komisaris memiliki kedudukan yang sama dengan keberadaan eks pejabat pemerintah dalam dewan komisaris yaitu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai pemegang saham pengendali perusahaan. Salah satu motif terkait keberadaan pejabat pemerintahan dalam dewan komisaris adalah untuk menyelaraskan keinginan pemerintah dalam penegakan peraturan dengan kegiatan bisnis korporasi (Schaefer 2013). Dengan adanya pejabat yang aktif di pemerintahan, tentunya diharapkan memiliki peran yang relevan dalam penegakan peraturan. Namun, ini tidak terlihat dalam hasil penelitian ini

#### **Pengaruh ukuran dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan pada data statistik deskriptif perusahaan sampel yaitu dengan melakukan perbandingan antara data PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk tahun 2014 dan 2016. Pada tahun 2014, PT BFI Finance Indonesia Tbk memiliki jumlah anggota dewan sebesar 9 (Sembilan) orang dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 1.9899. Sementara itu, pada tahun 2016 PT BFI Finance Indonesia Tbk memiliki jumlah anggota dewan sebesar 12 orang dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.4848. Data tersebut membuktikan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Dari perspektif teori pandangan berbasis sumber daya, hasil penelitian ini menandakan bahwa semakin besar ukuran atau jumlah anggota direksi dan komisaris dari perusahaan, maka akan semakin banyak atribut-atribut yang unik dan mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal kualitas pelaporan keberlanjutan. Semakin besar ukuran dewan mencerminkan semakin besar pula bakat dan sumber daya yang tersedia (baik dalam bentuk pengetahuan dan ketertarikan hal tertentu) untuk perusahaan sehingga meningkatkan kapasitas yang dimiliki perusahaan dalam menangani permasalahan terkait dengan keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Chambers *et al.* dalam (Guerrero-Villegas *et al.* 2018) menambahkan bahwa semakin besar ukuran anggota dewan maka perusahaan akan mendapatkan pertukaran pemikiran dan pengalaman yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi aktivitas ataupun kebijakan strategis dan keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, apabila dilihat dari teori agensi, hasil penelitian ini menandakan bahwa semakin besar ukuran anggota dewan akan mengurangi dominasi manajemen dalam pengambilan keputusan (Hu dan Loh, 2018). Hal ini mengakibatkan ukuran dewan yang besar seringkali lebih baik dalam mengatasi potensi-potensi konflik kepentingan yang mungkin saja terjadi dalam perusahaan (Mak dan Roush, 2000). Ini menyebabkan perusahaan bisa memiliki





interest yang lebih kepada pelaporan keberlanjutan tanpa harus mengabaikan kepentingan-kepentingan lainnya yang ada di perusahaan. Semakin besar ukuran dewan, maka pemahaman akan pentingnya pelaporan keberlanjutan pun dapat disampaikan ke para pemangku kepentingan dengan baik dan efektif, sehingga berakibat pada peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Dalam perspektif teori legitimasi, hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan maka jumlah kepentingan yang terwakili pun akan semakin luas (Guerrero-Villegas *et al.* 2018). Dengan demikian, kebutuhan akan transparansi mengenai kebijakan strategis dan berkelanjutan pun sudah pasti akan meningkat dan hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk lebih terlibat dalam aspek keberlanjutan ataupun tanggung jawab sosial (Ntim dan Soobaroyen 2013).

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Guerrero-Villegas *et al.* (2017), Naseem *et al.* (2017), Shamil *et al.* (2014), dan Hu & Loh (2018) yang juga menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan akan menambah kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan ataupun laporan CSR.

### **Pengaruh keberadaan wanita dalam dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan terhadap statistik deskriptif perusahaan sampel. Berdasarkan data statistik deskriptif, variabel keberadaan wanita dalam dewan memiliki rata-rata sebesar 0.096231 atau hanya sebesar 9.62%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas keberadaan wanita dalam dewan secara signifikan masih lebih rendah dibandingkan keberadaan pria dalam dewan. Ini mengindikasikan bahwa peran wanita itu sendiri dalam perumusan kebijakan perusahaan pun tidak signifikan. Untuk memperkuat argumen tersebut dapat dilakukan perbandingan data statistik deskriptif PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki proporsi keberadaan wanita sebesar 0.38889 dengan nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6364. Sementara itu, pada tahun 2017, PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki proporsi keberadaan wanita sebesar 0.3500 namun memiliki nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.6364. Perbandingan ini membuktikan bahwa proporsi keberadaan wanita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Al-Shaer dan Zaman (2016), Liao *et al.* (2015), dan Rathnayaka Mudiyansele (2018) yang menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam dewan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan ataupun pengungkapan CSR perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian M. Shamil *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam dewan justru memiliki pengaruh negatif terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan lokasi pengambilan sampel. Al-Shaer dan Zaman (2016) dan Liao *et al.* (2015) mengambil sampel perusahaan terdaftar bursa di Britania Raya. Sementara itu M. Shamil *et al.* (2014) dan Rathnayaka Mudiyansele (2018) mengambil sampel perusahaan terdaftar di Sri Lanka. Perbedaan pengambilan lokasi sampel ini menjadi pembeda yang sangat penting karena ketiga lokasi sampel (Indonesia, Britania Raya, dan Sri Lanka) memiliki perspektif yang berbeda mengenai peran wanita dalam manajerial sebuah perusahaan. Di negara maju, seperti Britania Raya, sangat wajar apabila peran perempuan dalam pucuk pimpinan dapat berdampak positif terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan di negara tersebut. Hal ini disebabkan adanya tekanan besar dari masyarakat di negara tersebut mengenai kesetaraan gender. Di negara berkembang, seperti Indonesia, tentunya terdapat perbedaan pandangan mengenai hal itu.





Sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya, tingkat rata-rata keberadaan wanita dalam dewan pada perusahaan di Indonesia masih sangat rendah sehingga tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan dalam kebijakan keberlanjutan perusahaan. Apabila ditinjau dari perspektif teori pandangan berbasis sumber daya, jumlah wanita dalam dewan memang jauh lebih rendah secara signifikan ketimbang pria sehingga sumber daya yang diberikan oleh wanita dalam dewan masih terbatas peruntukannya. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan pengaruh dari keterbatasan kompetensi ataupun peran dari pemerintah dalam memoderasi peran wanita dalam dewan itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan wanita dalam dewan belum menjadi faktor penentu ataupun pembeda dalam hal perumusan kebijakan strategis dan keberlanjutan perusahaan di Indonesia.

### **Pengaruh keberagaman etnis terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh keberagaman etnis di Indonesia tidak dapat diuji dalam menggunakan model *Fixed Effect*. Hal ini disebabkan model *Fixed Effect* akan secara otomatis mengabaikan variabel-variabel yang mengalami kolinearitas yang tinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh hasil sampling yang menunjukkan bahwa variabel keberagaman etnis merupakan variabel yang tidak bervariasi seiring berjalannya waktu. Hal ini tercermin dari statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa secara rata-rata sebesar 97.3% perusahaan tahun memiliki keberagaman etnis yang heterogen atau dapat dikatakan mendekati nilai konstan. Dengan demikian, pengaruh keberagaman etnis terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan tidak bisa diuji dalam penelitian ini

### **Pengaruh usia perusahaan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan**

Hasil studi ini menunjukkan bahwa usia perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai kualitas pelaporan keberlanjutan. Hasil ini diperkuat dengan melihat data statistik deskriptif perusahaan sampel, yaitu dengan melakukan perbandingan antara data PT Adhi Karya Tbk pada tahun 2014 dan 2018. Pada tahun 2014, usia PT Indika Energy Tbk mencapai 53 tahun dan memiliki nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 1.8788. Sementara itu, pada tahun 2018 PT Adhi Karya mencapai usia 57 tahun dan memiliki nilai kualitas pelaporan keberlanjutan sebesar 2.0606. Perbandingan ini membuktikan bahwa semakin bertambah usia perusahaan maka kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan sampel pun akan semakin meningkat.

Dalam sudut pandang teori pandangan berbasis sumber daya, usia perusahaan pada dasarnya merefleksikan pengalaman dan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan sumber daya yang bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin bertambahnya usia perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk melakukan hal tersebut seiring dengan kematangan dan pengalaman yang diperoleh. Hal ini pula yang akan memberikan daya tarik tersendiri bagi sumber daya tersebut untuk bergabung kepada perusahaan sehingga dapat memberikan dampak yang unik dan bermanfaat bagi keunggulan kompetitif perusahaan. Semakin bertambahnya usia perusahaan maka perusahaan akan semakin mudah dalam mengumpulkan orang-orang yang ahli dan memiliki kompetensi yang sesuai sehingga dapat memperbaiki persiapan informasi dalam laporan keberlanjutan ataupun laporan tanggung jawab sosial (Bayoud *et al.*, 2012).

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Bayoud *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa semakin bertambah usia perusahaan maka level pengungkapan CSR ataupun laporan keberlanjutan akan semakin baik. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Shamil *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa usia perusahaan justru memiliki pengaruh negative terhadap pelaporan keberlanjutan. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu (1) variabel usia perusahaan pada Shamil *et al.* (2014) dideskripsikan dengan usia perusahaan terdaftar di Bursa Efek. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini dimana usia





perusahaan dideskripsikan sebagai jumlah usia perusahaan yang dihitung sejak tahun berdirinya; (2) variabel pelaporan keberlanjutan yang digunakan oleh Shamil *et al.* (2014) dioperasionalkan dengan menggunakan dummy variable. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mana pelaporan keberlanjutan dioperasionalkan dengan menggunakan skala *Sustainability Reporting Quality* (SRQ) yang disusun oleh Adai (2020). Perbedaan ini menyebabkan variabel yang digunakan oleh Shamil *et al.* (2014) tidak dapat menangkap unsur kualitas dari pelaporan keberlanjutan itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian data panel yang dilakukan dengan menggunakan model estimasi *Fixed Effect* diperoleh simpulan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kualitas pelaporan berkelanjutan adalah jumlah rapat direksi, ukuran dewan, usia dan ukuran Perusahaan. Sementara itu, keberadaan anggota dewan yang senior, intensitas rapat dewan komisaris, keberadaan komisaris independen, eks pejabat pemerintah, pejabat pemerintah yang aktif, dan keberadaan wanita, ternyata tidak memberikan efek terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil riset ini, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Saran yang penulis berikan antara lain, (i) menambah variabel independen lainnya untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan dari perspektif dewan, misalnya variabel kompetensi atau lama masa kerja, (ii) mengembangkan ukuran operasionalisasi variabel-variabel yang mengalami masalah time-invariant seperti Board Ethnicity dan Industry, dan (iii) menyesuaikan skala kualitas pelaporan keberlanjutan dengan ketentuan yang ada pada Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 sehingga lebih relevan dengan kondisi perusahaan di Indonesia, serta (iv) melakukan uji beda antara kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan setelah berlakunya Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 dengan sebelum berlakunya peraturan tersebut. Hal ini berguna untuk mengetahui seberapa efektif peraturan tersebut mempengaruhi tingkat dan kualitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia serta mengetahui aspek apa saja yang dapat diperbaiki di masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S. N., & Ismail, K. N. I. K. (2013). Gender, ethnic and age diversity of the boards of large Malaysian firms and performance. *Jurnal Pengurusan*, 38, 27–40.
- Adai, C. R. L. (2020). Sustainability reporting quality of peruvian listed companies and the impact of regulatory requirements of sustainability disclosures. *Sustainability* (Switzerland), 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12031135>
- Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2016). Board gender diversity and sustainability reporting quality. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(3), 210–222. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.09.001>
- Amidjaya, P. G., & Widagdo, A. K. (2019). Sustainability reporting in Indonesian listed banks: Do corporate governance, ownership structure and digital banking matter? *Journal of Applied Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2018-0149>
- Amran, A., Lee, S. P., & Devi, S. S. (2014). The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217–235. <https://doi.org/10.1002/bse.1767>





- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v4i3.8303>
- Arayssi, M., Dah, M., & Jizi, M. (2016). Women on boards, sustainability reporting and firm performance. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(3), 376–401. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2015-0055>
- Awalia, E. N., Anggraini, R., & Prihatni, R. (2015). Pengaruh Dewan Direksi, Dewankomisaris Independen, Leverage, Dan Aktivitas Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 10(2), 124. <https://doi.org/10.21009/10.21.009/wahana.010/2.2>
- Bakar, A. B. S. A., Ghazali, N. A. B. M., & Ahmad, M. B. (2019). Sustainability Reporting and Board Diversity in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i2/5663>
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantages. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Bayoud, N. S., Kavanagh, M., & Slaughter, G. (2012a). Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms: A Mixed Study. *International Journal of Economics and Finance*, 4(4). <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n4p13>
- Bayoud, N. S., Kavanagh, M., & Slaughter, G. (2012b). Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms: A Mixed Study. *International Journal of Economics and Finance*, 4(4), 13–29. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n4p13>
- Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2006). Corporate social responsibility and resource-based perspectives. *Journal of Business Ethics*, 69(2), 111–132. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9071-z>
- Chang, W. F., Amran, A., Iranmanesh, M., & Foroughi, B. (2019). Drivers of sustainability reporting quality: financial institution perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 632–650. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2019-0006>
- Cucari, N., Esposito De Falco, S., & Orlando, B. (2018). Diversity of Board of Directors and Environmental Social Governance: Evidence from Italian Listed Companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(3), 250–266. <https://doi.org/10.1002/csr.1452>
- Dienes, D., Sassen, R., & Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 154–189. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2014-0050>
- Dienes, D., & Velte, P. (2016). The impact of supervisory board composition on CSR reporting. Evidence from the German two-tier system. *Sustainability (Switzerland)*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su8010063>
- Diono, H., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2017). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10. EY. (2013). *Value of sustainability reporting - A study by E and Boston College*. 1–29. [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY\\_-\\_Value\\_of\\_sustainability\\_reporting/\\$FILE/EY-Value-of-Sustainability-Reporting.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Value_of_sustainability_reporting/$FILE/EY-Value-of-Sustainability-Reporting.pdf)
- Ghabayen, M. A., Mohamad, N. R., & Ahmad, N. (2016). Board characteristics and corporate social responsibility disclosure in the Jordanian banks. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 12 (ICONTI), 84–99. <https://doi.org/10.22495/cbv12i1c1art2>





- Guerrero-Villegas, J., Pérez-Calero, L., Hurtado-González, J. M., & Giráldez-Puig, P. (2018). Board attributes and corporate social responsibility disclosure: A meta-analysis. *Sustainability* (Switzerland), 10(12), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su10124808>
- Gunawan, J. (2015). Corporate social disclosures in Indonesia: Stakeholders' influence and motivation. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 535–552. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2014-0048>
- Hafsi, T., & Turgut, G. (2013). Boardroom Diversity and its Effect on Social Performance: Conceptualization and Empirical Evidence. *Journal of Business Ethics*, 112(3), 463–479. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1272-z>
- Harymawan, I., Agustia, D., Aprilia, P., & Ratri, M. C. (2020). Board Meeting, Loss, and Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9(11), 133–150. [https://doi.org/http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.J\(11\)](https://doi.org/http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.J(11))
- Helfaya, A., & Whittington, M. (2019). Does designing environmental sustainability disclosure quality measures make a difference? *Business Strategy and the Environment*, 28(4), 525–541. <https://doi.org/10.1002/bse.2262>
- Helfaya, A., Whittington, M., & Alawattage, C. (2019). Exploring the quality of corporate environmental reporting: Surveying preparers' and users' perceptions. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(1), 163–193. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2023>
- Herremans, I. M., Nazari, J. A., & Mahmoudian, F. (2016). Stakeholder Relationships, Engagement, and Sustainability Reporting. *Journal of Business Ethics*, 138(3), 417–435. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2634-0>
- Hidayat, A. A., & Utama, S. (2017). Board characteristics and Firm Performance : Evidence From Indonesia. *Accounting and Finance*, 8(3), 137–154. <https://doi.org/10.1111/acfi.12308>
- Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *Stata Journal*, 7(3), 281–312. <https://doi.org/10.1177/1536867x0700700301>
- Hu, M., & Loh, L. (2018). Board governance and sustainability disclosure: A cross-sectional study of Singapore-listed companies. *Sustainability* (Switzerland), 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072578>
- Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance. *Journal of Business Ethics*, 149(2), 411–432. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3099-5>
- International Finance Corporation. (2014). The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition. *The Indonesia Corporate Governance Manual*, 1(7), 1–533. <https://doi.org/10.2307/796256>
- Janggu, T., Darus, F., Zain, M. M., & Sawani, Y. (2014). Does Good Corporate Governance Lead to Better Sustainability Reporting? An Analysis Using Structural Equation Modeling. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 138–145. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.020>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2014). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 601–615. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2>
- Kets De Vries, M. F. R., & Miller, D. (1984). Neurotic style and organizational pathology. *Strategic Management Journal*, 5(1), 35–55. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050104>





- KPMG International. (2013). *The KPMG Survey Responsibility*. 82. <https://doi.org/www.kpmg.com/sustainability>
- KPMG International. (2015). *Currents of Change - The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015*. KPMG Corporate Responsibility Reporting, 1–48. <https://doi.org/www.kpmg.com/sustainability>
- Kusumastuti, S., & Sastra, P. (2007). Pengaruh *Board Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan Dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 88–98. <https://doi.org/10.9744/jak.9.2.pp.88-98>
- Latifah, S. W., Rosyid, M. F., Purwanti, L., & Oktavendi, T. W. (2019). Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan Sustainability Report (BUMN yang listed di BEI). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 200–213. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.56>
- Loh, L., Thomas, T., Lee, S. P., & Lim, L. (2019). *Sustainability Reporting in ASEAN Countries*.
- M. Shamil, M., M. Shaikh, J., Ho, P.-L., & Krishnan, A. (2014). The influence of board characteristics on sustainability reporting. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97. <https://doi.org/10.1108/ara-09-2013-0060>
- Madhani, P. M. (2010). *Resource Based View (RBV) of Competitive Advantage: An Overview*. March 2010. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1578704](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1578704)
- Madhani, P. M. (2019). Diverse Roles of Corporate Board : A Review of Various *Corporate Governance D*. 16(June), 1–21.
- Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. *Sustainability (Switzerland)*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su10010207>
- Manning, B., Braam, G., & Reimsbach, D. (2019). Corporate governance and sustainable business conduct—Effects of board monitoring effectiveness and stakeholder engagement on corporate sustainability performance and disclosure choices. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(2), 351–366. <https://doi.org/10.1002/csr.1687>
- Marquis, C., & Qian, C. (2014). Corporate social responsibility reporting in China: Symbol or substance? *Organization Science*, 25(1), 127–148. <https://doi.org/10.1287/orsc.2013.0837>
- Michael, & Lukman, H. (2019). Pengaruh Proporsi Direksi Independen , Proporsi Komisaris Independen Dan Stakeholders Terhadap *Sustainability Report*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, I(3), 638–645.
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 33(November), 59–78. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003>
- Miller, T., & Triana, M. del C. (2009). Demographic Diversity in the Boardroom : Mediators of the Board Diversity – Firm Performance Relationship. *Journal of Management Studies*, 46(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x>
- Ntim, C. G., & Soobaroyen, T. (2013). Corporate governance and performance in socially responsible corporations: New empirical insights from a neo-institutional framework. *Corporate Governance: An International Review*, 21(5), 468–494. <https://doi.org/10.1111/corg.12026>
- Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of directors' composition and environmental corporate social responsibility. *In Business and Society (Vol. 50, Issue 1)*. <https://doi.org/10.1177/0007650310394642>





- Prado-Lorenzo, J. M., & Garcia-Sanchez, I. M. (2010). The Role of the Board of Directors in Disseminating Relevant Information on Greenhouse Gases. *Journal of Business Ethics*, 97(3), 391–424. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0515-0>
- Rathnayaka Mudiyansele, N. C. S. (2018). Board involvement in corporate sustainability reporting: evidence from Sri Lanka. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(6), 1042–1056. <https://doi.org/10.1108/CG-10-2017-0252>
- Robinson, C., & Schumacker, R. E. (2009). Interaction Effects : Centering, Variance Inflation Factor, and Interpretation Issues. *Multiple Linear Regression Viewpoints*, 35(2).
- Rogers, W. H. (1993). Regression standard errors in clustered samples. *Stata Technical Bulletin* 13, In *Stata Technical Bulletin Reprints*, vols. 3, 88–94, 19–23.
- Rohmah, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Dalam Laporan Sustainability (Studi Empiris Pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Esensi*, 5(2), 243–262. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2347>
- Schaede, U. (2013). The “old boy” network and government-business relationships in Japan. *Japan: Economic Success and Legal System*, 21(2), 345–370. <https://doi.org/10.1515/9783110908886.345>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach Seventh Edition*. Wiley, 1–447.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. 6, 465–480. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(01\)00241-7](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00241-7)
- Shamil, M. M., Shaikh, J. M., Ho, P. L., & Krishnan, A. (2014). The influence of board characteristics on sustainability reporting Empirical evidence from Sri Lankan firms. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2013-0060>
- Staden, C. van, & Chen, X. (2010). *Stakeholder Pressure, Social Trust, Governance and The Disclosure Quality of Environmental Information*. Sixth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA).
- Stanny, E., & Ely, K. (2008). Corporate environmental disclosures about the effects of climate change. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(6), 338–348. <https://doi.org/10.1002/csr.175>
- StataCorp. (2013). *Xtreg Manual*. In 2013 (pp. 1–29). <http://www.stata.com/manuals13/xtxtreg.pdf>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 90.
- Velte, P. (2017). Does board composition have an impact on CSR reporting? *Problems and Perspectives in Management*, 15(2), 19–35. [https://doi.org/10.21511/ppm.15\(2\).2017.02](https://doi.org/10.21511/ppm.15(2).2017.02)
- Veronica Siregar, S., & Bachtiar, Y. (2010). Corporate social reporting: empirical evidence from Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 241–252. <https://doi.org/10.1108/17538391011072435>
- Vitolla, F., Raimo, N., & Rubino, M. (2020). Board characteristics and integrated reporting quality: an agency theory perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 1152–1163. <https://doi.org/10.1002/csr.1879>
- Widianto, H. S., & Prastiwi, A. (2011). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV*, 1–30. [eprints.undip.ac.id/27413/1/Jurnal\\_Sustainability\\_Report\\_Hari.pdf](https://eprints.undip.ac.id/27413/1/Jurnal_Sustainability_Report_Hari.pdf)